

**IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH PADA  
SD NEGERI 178493 BATU MAMAK  
KABUPATEN TOBA**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**DINA RIA BR SITORUS**

**208520048**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/11/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH PADA  
SD NEGERI 178493 BATU MAMAK  
KABUPATEN TOBA**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area



**OLEH  
DINA RIA BR SITORUS  
208520048**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 22/11/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

### LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah  
Pada SD Negeri 178493 Batu Mamak  
Nama : Dina Ria br Sitorus  
NPM : 208520048  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing

  
Dr. Drs. Indra Muda, M.AP  
Pembimbing

  
Dr. Walid Musthafa Sembiring S.Sos, M.I.Pol  
Dekan

  
Dr. Drs. Indra Muda, M.AP  
Ka. Prodi

### HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 10 September 2024



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

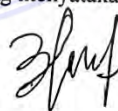
Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Ria br Sitorus  
NPM : 208520048  
Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Implementasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri 178493 Batu Mamak”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada Tanggal : 10 September 2024  
Yang menyatakan



Dina Ria br Sitorus

## ABSTRAK

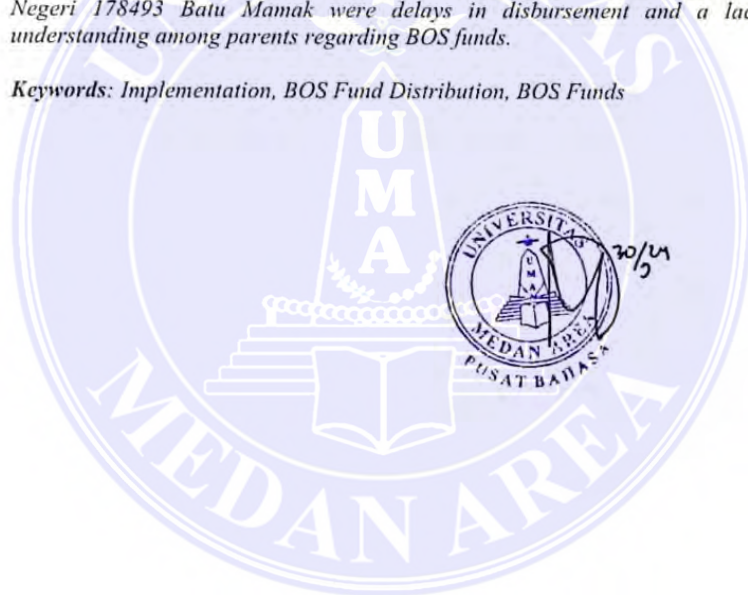
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Ristek dan teknologi Nomor 63 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah satuan Pendidikan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya keterlambatan penyaluran dana BOS pada SD Negeri 178493 Batu Mamak Kabupaten Toba. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi penyaluran dana BOS pada SD Negeri 178493 Batu Mamak serta menganalisis faktor penghambat implementasi penyaluran dana BOS di SD Negeri 178493 Batu Mamak Kabupaten Toba. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori George Edward III, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Penyaluran Dana BOS Pada SD Negeri 178493 Batu Mamak pada indikator komunikasi dan sumber daya belum terlaksana dengan baik. Namun untuk indikator disposisi dan struktur birokrasi sudah terlaksana dengan baik. Yang menjadi faktor penghambat dalam penyaluran dana BOS di SD Negeri 178493 Batu Mamak yaitu adanya keterlambatan pencairan dana BOS dan kurangnya pengetahuan orang tua siswa terkait dana BOS.

**Kata kunci: Implementasi, Penyaluran Dana BOS, Dana BOS**

### ABSTRACT

*The School Operational Assistance (BOS) fund is an effort made by the Government to improve the quality of education and human resources in Indonesia. The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology issued Ministerial Regulation No. 63 of 2022 regarding technical guidelines for the management of BOS funds in educational institutions. This research was motivated by the delay in the disbursement of BOS funds at SD Negeri 178493 Batu Mamak, Toba Regency. The purpose of this research was to understand and describe the implementation of BOS fund distribution at SD Negeri 178493 Batu Mamak and to analyze the inhibiting factors in the implementation of BOS fund distribution at SD Negeri 178493 Batu Mamak, Toba Regency. The theory used in this research was George Edward III's theory, using descriptive qualitative research methods. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The results of the research showed that the implementation of BOS fund distribution at SD Negeri 178493 Batu Mamak was not well-executed in terms of communication and resources indicators. However, the disposition and bureaucratic structure indicators were well-executed. The inhibiting factors in the distribution of BOS funds at SD Negeri 178493 Batu Mamak were delays in disbursement and a lack of understanding among parents regarding BOS funds.*

**Keywords:** Implementation, BOS Fund Distribution, BOS Funds



## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bukit Harapan Pada tanggal 17 Juni 2002 dari ayah Mardus Sitorus dan ibu Mayerni br Sihotang. Penulis merupakan putri dari 4 bersaudara.

Tahun 2020 Penulis lulus dari SMA Negeri 1 Balige dan Pada Tahun 2020 terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.





## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah Penyaluran Dana BOS dengan judul **“Implementasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri 178493 Batu Mamak Kabupaten Toba”**.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Drs. Indra Muda, M.AP selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini serta Ibu Riri Rezeki Hariani, S.Sos, M.AP yang telah memberikan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Ibu Dharma Ulina Siregar S.Pd selaku kepala Sekolah SD Negeri 178493 Batu Mamak dan orang tua murid yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan Pendidikan maupun Masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis



(Dina Ria br Sitorus)  
NPM 208520048

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRAC</i> .....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	6
2.1 Implementasi Kebijakan Publik .....	6
2.1.1 Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik.....	8
2.1.2 Model-Model Implementasi Kebijakan .....	8
2.2 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .....	16
2.2.1 Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	16
2.2.2 Sasaran dan Besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	18
2.2.3 Penatausahaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	23
2.2.4 Kebijakan Dasar Penyelenggaraan Program BOS.....	25
2.3 Penelitian Terdahulu .....	26
2.4 kerangka Berpikir .....	29
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	30

3.3 Informan Penelitian .....	31
3.4 Teknik Pengumpulan Penelitian.....	33
3.5 Teknik Analisa Data .....	34
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	37
4.1 Hasil Penelitian .....	37
4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	37
4.1.2 Profil Sekolah .....	37
4.1.3 Visi dan Misi.....	38
4.1.4 Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan .....	38
4.1.5 Data Peserta Didik .....	39
4.1.6 Sarana dan Prasarana .....	40
4.1.7 Data Keuangan Dana Sekolah .....	40
4.1.8 Pengalokasian dan Penggunaan Dana BOS .....	41
4.1.9 Struktur Organisasi .....	43
4.2 Pembahasan.....	44
4.2.1 Implementasi Penyaluran Dana BOS di SD Negeri 178493 Batu Mamak .....	44
4.2.2 Faktor Penghambat Penyaluran Dana BOS di SD Negeri 178493 Batu Mamak .....	58
V. PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan .....	61
5.2 Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN .....	66

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Jumlah Siswa Di SD Negeri 178493 Tahun 2021-2023 .....	4
Tabel 2. Penelitian Terdahulu .....	26
Tabel 3. Jadwal Pelaksana .....	31
Tabel 4. Daftar Informan Penelitian.....	33
Tabel 5. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan .....	39
Tabel 6. Tingkat Pendidikan .....	39
Tabel 7. Jenis Kelamin Siswa .....	40
Tabel 8. Jenis Sarana dan Prasarana .....	40
Tabel 9. Pendistribusian dana BOS Reguler SD Negeri 178493 Batu Mamak tahun 2023 .....	41
Tabel 10. Pendistribusian dana BOS Reguler SD Negeri 178493 Batu Mamak tahun 2021-2023 .....	41
Tabel 11. Perencanaan Penggunaan Standar Dana BOS tahun 2023.....	42
Tabel 12. Penggunaan Dana BOS tahun 2023 .....	42

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Berpikir.....	30
Gambar 2. Struktur Organisasi Pada SD Negeri 178493 Batu Mamak.....	43



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I Pedoman Wawancara .....	66
Lampiran II Surat Izin Penelitian .....	83
Lampiran III Surat Selesai Penelitian .....	84
Lampiran IV Dokumentasi .....	85



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Implementasi merupakan sebuah proses pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditentukan atau dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dimana implementasi adalah sebuah aspek terpenting dalam proses kebijakan. Dalam pengimplementasian suatu kebijakan tidaklah mudah, kebijakan tersebut haruslah memiliki tujuan dan sasaran yang tepat. Salah satu implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Masyarakat.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sendiri merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas Pendidikan dan juga kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2 yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainnya”. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dana BOS diluncurkan pada awal juli 2005 setelah diterbitkannya Undang-undang otonomi daerah pada tahun 2001, tentang dilaksanakan desentralisasi yang di antara wujudnya adalah penyerahan urusan pendidikan (sekolah) kepada pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah pusat hanya mengurus SNPK (standar, norma, prosedur, kebijakan). Urusan 3M (*man, money, material*) sumber daya manusia, anggaran, dan aset diserahkan kepada pemerintah daerah. Peran provinsi terkait hal ini, yaitu bertindak sebagai koordinator.

Namun, selama empat tahun pelaksanaan otonomi, masih banyak sekolah yang tidak terurus dengan baik, proses belajar mengajar (PBM) berjalan seadanya, serta fasilitas sekolah banyak yang rusak. Hal ini terjadi di antaranya karena sekolah kekurangan biaya operasional karena pemerintah daerah tidak memberikan anggaran yang cukup, bahkan ada beberapa pemerintah daerah yang tidak memberi anggaran sama sekali. Padahal, apapun kondisinya, proses belajar mengajar harus tetap berjalan. Sehingga, orang tua dan masyarakat yang menjadi sasaran. Sekolah menarik dana dari masyarakat sehingga mereka terbebani.

Dikarenakan banyaknya keluhan, baik dari sekolah maupun masyarakat, bahkan dari dinas pendidikan sendiri, DPR dan pemerintah sepakat menganggarkan bantuan operasional sekolah dengan tujuan agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dijalankan oleh sekolah tanpa membebani masyarakat. Awalnya, dana BOS dianggarkan di pusat dan dikelola oleh pusat. Prosesnya berjalan lancar walaupun masih ada pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan di beberapa sekolah. Proses belajar-mengajar pun sudah bisa berjalan normal.



Menurut Petunjuk Teknik (juknis) yang diatur dalam dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022, Dana BOS adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dengan sasaran semua sekolah PAUD, SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP), Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri), SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia dalam pelaksanaan program wajib belajar. Program dana BOS dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pendidikan minimal jenjang SMA atau SMK. Dimana penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini dilakukan dua kali dalam satu tahun yaitu paling cepat awal bulan Januari dan bulan Juli.

Terkait dengan implementasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), di beberapa daerah masih terdapat ketidaksesuaian antara peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan realita yang ada dilapangan. Salah satunya yaitu SD Negeri 178493 Batu Mamak yang merupakan penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berada di kecamatan Pintu Pohan Meranti, kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara. Dimana dalam pengimplementasian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terdapat ketidaksesuaian dan keterlambatan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut. Selain itu, fasilitas di sekolah ini masih kurang seperti tidak adanya komputer untuk dipakai siswa ketika ujian nasional dan juga sedikitnya buku yang ada di perpustakaan. Dimana perlengkapan kebutuhan perpustakaan merupakan bagian dari pembiayaan dan BOS.

Penelitian ini juga diperkuat dengan adanya penelitian terdahulu yang masalahnya cukup relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dikutip dari skripsi Herdiyani, Rinda (2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan RKAS tepat waktu diawal tahun anggaran, berdasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, serta melibatkan komite dan guru. Aspek pelaksanaan belum seluruhnya berhasil dikarenakan penyaluran dana BOS masih terlambat. administrasi pembukuan sudah sesuai dengan Permendiknas No. 48 Tahun 2017. Tingkat efektivitas pengelolaan dana BOS pada SD Negeri Girirejo 02 mencapai 63%, berada dalam kriteria efektif.

Tabel 1. Data Jumlah Siswa di SD Negeri 178493 Batu Mamak Tahun 2021-2023

No	Siswa SD Negeri 178493 Batu Mamak	Jumlah Siswa Tahun 2021	Jumlah Siswa Tahun 2022	Jumlah Siswa Tahun 2023
1	Siswa Laki-laki	107	100	87
2	Siswa Perempuan	116	112	94
<b>Total</b>		<b>223</b>	<b>212</b>	<b>181</b>

Sumber: Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri 178493 Batu Mamak Kabupaten Toba Samosir**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini di tuangkan dalam bentuk pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana implementasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 178493 Batu Mamak Kabupaten Toba Samosir?

2. Apa faktor penghambat implementasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 178493 Batu Mamak Kabupaten Toba Samosir?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 178493 Batu Mamak Kabupaten Toba Samosir.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 178493 Batu Mamak Kabupaten Toba Samosir.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat menjadi sumber informasi dan referensi terhadap penelitian yang akan mendatang terkait implementasi penyaluran dana bantuan operasional sekolah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat, khususnya bagi SD Negeri 178493 Batu Mamak.

## **BAB II** **TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Implementasi Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dinyatakan ataupun dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. James Anderson dalam Wahab (2012: 8) mengartikan kebijakan publik sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dari proses kebijakan setelah proses perumusan kebijakan publik. Proses implementasi merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam proses kebijakan, apakah kebijakan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Van Meter Van Horn dalam Subarsono (2005: 100) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Pendapat Mulyadi (2015:26) mengenai implementasi kebijakan publik adalah sebuah perubahan atau sebuah transformasi-transformasi yang pada dasarnya bersifat seperti multiorganisasi, yang dimana perubahan-perubahan yang ada diterapkan secara berkesinambungan dengan strategi-strategi implementasi akan kebijakan yang mengaitkan dengan kebutuhan lapisan masyarakat diseluruh tingkat lapisannya.

Kemudian menurut Purwanto dalam Syahida (2014:13), beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Ripley dan Franklin dalam Budi winarno (2012: 148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah kebijakan perundang-undangan ditetapkan yang memberikan otoritas program, keuntungan (*benefit*), kebijakan, atau sejenis keluaran yang nyata (*tangible output*) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah tindakan agar sebuah kebijakan dapat dicapai sesuai dengan tujuannya untuk lebih mengimplementasikan suatu kebijakan publik.

Syaukani, dkk (2004: 295) mengemukakan implementasi kebijakan adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan untuk menyampaikan kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Termasuk sekumpulan kegiatan, yang perlu dipersiapkan pertama maju menetapkan seluruh aturan yang merupakan interpretasi kebijakan. Yang kedua, menyiapkan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Ini termasuk insrastruktur, sumber daya keuangan dan tentu saja menentukan siapa yang akan bertanggung jawab untuk menegakkan kebijakan ini. Ketiga, bagaimana menyampaikan kebijakan konkrit kepada publik.

### 2.1.1 Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Tahap implementasi implementasi secara umum merupakan bagaimana suatu kebijakan yang dikeluarkan menjadi suatu jawaban dari masalah yang dialami oleh masyarakat, kemudian diterapkan agar maksimal dan dapat menjawab permasalahan tersebut. Namun tahap implementasi bukanlah merupakan bagian yang mudah, pembuat kebijakan perlu melihat dan Menyusun strategi yang agar kebijakan yang dibuat benar-benar bisa berjalan dengan baik.

Zainal Abidin (2012:155-157) mengklasifikasikan pendekatan dalam implementasi kebijakan publik, antara lain:

“Pendekatan Struktural dimana peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Jika organisasi dianggap tidak sesuai dengan wujud perubahan yang muncul dari kebijakan, maka perlu dilakukan *Planning of change* dan *Planning for change*. Pendekatan prosedural/majerial, melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan (*planning, programming, budgeting, supervision, atau programming, evaluation, review tehniqe*). Pendekatan kewajiban/*behavior*, berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Pendekatan politik, Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi.”

Hal ini tentunya berdasarkan atas apa yang kita lihat, banyak diantara kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang ternyata bisa dikatakan gagal dalam mengimplementasi. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan tersebut kedepannya hanyalah seperti hiasan saja bagi selama masa kepemimpinannya dengan catatan pernah dibuat suatu peraturan. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan.

### 2.1.2 Model-Model Implementasi kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing- masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

#### 1. Model Van Meter dan Van Horn

Model pertama adalah model yang paling klasik yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Syahrudin (2018: 41) mengemukakan pendapat mengenai “Implementasi adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang memengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut

##### 1. Standar dan sasaran kebijakan

Setiap kebijakan harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terstruktur dengan ketentuan tersebut tujuan dapat terwujud.

##### 2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia adalah sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu proses implementasi. Tahap- tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi

menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu minim, maka Kinerja kalijakan publik agak suhlit diharapkan secara optimal.

3. Komunikasi antar organisasi

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan anisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh corak para agen pelaksana. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku masyarakat agar tidak radikal menerima keputusan apapun dari para pembuat kebijakan, maka agen pelaksana haruslah berkarakteristik tegas dan ketat pada aturan hukum sebagai pedoman kebijakan.

4. Karakteristik agen pelaksana/implementor

Koordinasi merupakan mekanisme yang tangguh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dan arus komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, maka semakin kecil kemungkinannya akan terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan konflik, begitu pula sebaliknya.

5. Kecenderungan (disposition) pelaksana/implementor

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana sangatlah mempengaruhi berhasil dan tidaknya kinerja Anglementan kebijakan



publik. Kebijakan yang akan dilaksanakan implementor semata-mata kebijakan yang lahir dari atas hâp down yang cenderung bersifat general.

#### 6. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Pada bagian ini, yang perlu menjadi perhatian dalam menilai kinerja implementasi kebijakan publik, sebagaimana yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan sosial, ekonomi dan politik mendorong terciptanya keberhasilan kebijakan publik sesuai yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif, akan berpengaruh dan menjadi potensi kegagalan kinerja implementasi kebijakan publik. Karena itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat ditentukan adanya dukungan dan lingkungan yang kondusif.

#### 2. Model Daniel Mazmain dan Paul A. Sabatier

Model Mazmain dan Sabatier disebut dengan model Kerangka Analisis Implementasi. Daniel Mazmain dan Paul A. Sabatier dalam Nugroho (2023: 739) mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan.

Daniel Mazmain dan Paul A. Sabatier dalam Nugroho (2023:739-740) mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel yaitu:

“Variabel Independen, yaitu mudah tidaknya masalah yang akan dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan yang dikehendaki. Kedua yaitu Variabel Intervening, yaitu kemampuan kebijakan public, sikap dan sumber daya konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana. Dan yang ketiga Variabel Dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman

dari Lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang bersifat mendasar.”

Model implementasi oleh Mazmanian dan Sabatier terpusat pada hubungan antara keputusan-keputusan dengan encapaiannya, formula dengan implementasinya, dan potenss hirarki dengan batas-batasnya, serta kesungguhan implementer untuk mencapai tujuan, yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Selain itu, pendekatan Marmanian dan sabatier juga mencoba memprediksikan signifikansi hubungan antara para aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan atau ares problem. dengan keterbatasan hirarki formal dalam kondisi hubungan dengan lingkungan diluar Peraturan.

### 3. Model Edward III

Perspektif model pendekatan implementasi Edward III adalah top-down. George Edward III dalam Nugroho (2023:747) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah kurangnya perhatian pada persoalan implementasi kebijakan. Adanya 4 (empat) variabel sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Edward III yaitu:

#### a. Komunikasi

Komunikasi yang baik akan menjamin pemahaman yang baik dan benar terhadap suatu kebijakan sehingga implementasinya dapat terlaksana dengan baik dan efektif. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap

serta tanggapan dari pihak yang terlibat. Terdapat 3 indikator untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

- Transmisi: Yaitu apakah kebijakan telah dilaksanakan dan petunjuk pelaksanaannya sudah ada.
- Kejelasan: Kejelasan dalam berkomunikasi. Jika tidak jelas maka pesan dari komunikasi ini yang disampaikan oleh pelaksana dapat memicu interpretasi ada kesalahpahaman atau bahkan interpretasi yang bertentangan dari pesan awal antar pelaksana.
- Konsistensi: berkaitan dengan perintah dari komunikasi sejelas mungkin maka faktor lain yang harus ada adalah perintah itu sendiri itu sendiri. Perintah yang baik tentu tidak selalu mendapat penolakan dari pihak-pihak yang terlibat. Dampak penolakan terhadap perintah ini dapat menimbulkan kesulitan melaksanakan kebijakan dan melaksanakan tugas yang ada dengan sebaik mungkin. Perintah atasan dapat dikatakan tidak konsisten apabila dilaksanakan ketika mencari tindakan yang selonggar mungkin ketika menafsirkan dan mengerjakan implementasi kebijakan yang sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

#### b. Sumber Daya

Sumber daya (*resources*) berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, utamanya sumber daya manusia. Edward III dalam Widodo (2021: 98) menegaskan bahwa:

“Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian

ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.”

Aspek sumber daya penting dalam hal ini adalah keterampilan pelaksana kebijakan yang akan mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Elemen-elemen sumber daya pada model Edward III ini adalah:

- Sumber Daya Manusia, merupakan salah satu variabel yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Edward III (1980: 53) menegaskan bahwa sumber daya yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah Staf. Sumber daya manusia (Staf) haruslah memiliki jumlah yang cukup dan memiliki keahlian dalam melaksanakan kebijakan.
- Informasi, informasi yang relevan dan cukup tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijaksanaan tersebut, hal agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dan menginterpretasikan bagaimana mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan tersebut. Disamping itu informasi ini penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.
- Kewenangan, kewenangan diperlukan untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki. Edwards mengemukakan

bahwasannya pemerintah sesungguhnya sudah memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan tetapi sering kewenangan itu tidak dipergunakan seefektif mungkin dikarenakan macam-acam faktor misalnya kebutuhan dan pertimbangan politik serta memikirkan hak asasi manusia serta nilai dan norma kemanusiaannya.

- Fasilitas, fasilitas merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan yang meliputi, antara lain gedung, tanah, dan sarana yang kesemuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Kurang cukupnya sumber-sumber ini, berarti ketentuan atau aturan-aturan (*laws*) tidak akan menjadi kuat, pelayanan tidak akan diberikan, dan pengaturan-pengaturan (*regulations*) yang beralasan tidak akan dikembangkan.

c. Disposisi

Kesediaan dan komitmen dari para implementator untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Subarsono (2012:91-92) mengartikan disposisi sebagai watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Disini, disposisi tidak hanya berarti mengetahui apa yang harus dilakukan melainkan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Variabel-variabel disposisi yaitu:

- Pengangkatan birokrat disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi

kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khususnya lagi kepada kepentingan nasional.

- Insentif, dapat dikatakan sebagai salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana untuk memanipulasi biaya. Karena dengan insentif sedikit banyak akan mempengaruhi para pelaksana untuk lebih meningkatkan kinerjanya.

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi saling terkait dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi pelaksana implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini adalah Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana *bureaucratic fragmentation* tidak terjadi, karena struktur demikian akan menghambat implementasi pelaksanaan kebijakan publik. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan tersedia, maka sumber daya menjadi tidak efektif.

#### 4. Model Merilee S. Grindle

Model Implementasi Kebijakan Publik sebagaimana dikemukakan oleh Grindle dalam Nugroho (2023: 745) ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.

Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

- a. Proses: apakah implementasi kebijakan sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan (dirancang) dengan mengacu pada tindakan kebijakan tersebut.
- b. Tujuan: yaitu apakah tujuan kebijakan tercapai berdasarkan indicator:
  - 1) Dampak atau akibat terhadap masyarakat secara individu maupun kelompok.
  - 2) Tingkat perubahan yang terjadi dan penerimaan kelompok sasaran.

## **2.2 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

### **2.2.1 Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah dengan memberikan membantu kepada sekolah agar dapat memberikan pembelajaran yang lebih optimal. Kebijakan BOS ini dibuat untuk mewujudkan tujuan pemerintah dalam program wajib belajar bagi seluruh masyarakat Indonesia guna memcerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing masyarakat guna memajukan negara Indonesia.

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa

kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Menteri dalam negeri republik Indonesia (Permendagri) Nomor 24 tahun 2020 tentang bantuan operasional sekolah pada pemerintah daerah, Dana Bantuan Operasional Sekolah yang disingkat Dana BOS adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan Pendidikan dasar menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka program wajib belajar 12 tahun yang bermutu. Tujuan khusus dari dana ini untuk digunakan Lembaga Pendidikan sudah ada di dalam petunjuk Teknik yang dikatakan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (2012: 3) adalah:

1. “Melakukan pembebasan pungutan kepada semua peserta didik SDLB/SD dan SMPLB/SMP atau juga SMP yang terbuka agar menggratiskan pendanaan operasi pada Pendidikan, kecuali sekolah dengan taraf Internasional. Pungutan atau sumbangan yang ada di sekolah RSBI harus tetap memerhatikan kapasitasnya sehingga pungutan tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memberatkan pelajar.”
2. Memberikan kebebasan bagi peserta didik yang datang dari keluarga yang kurang mampu untuk tidak dimintai lagi tentang pungutan sekolah baik yang bersekolah di swasta dan negeri.



3. Biaya dana BOS digunakan untuk memperingankan beban terhadap Pendidikan bagi banyaknya peserta didik yang sedang mengenyam Pendidikan.

Pengolahan dana BOS didasarkan melalui prinsip-prinsip yang ada pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi nomor 63 tahun 2022:

- a. Fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana;
- b. Efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
- c. Efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. Akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengkomodir aspirasi pemangku kepentingan Pendidikan.

### **2.2.2 Sasaran dan Besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi nomor 63 tahun 2022 mengenai petunjuk Teknik pengolahan dana BOS sasaran yang menerima dana ini adalah:

1. PAUD
2. SD (Sekolah Dasar).
3. SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa).
4. SMP (Sekolah Menengah Pertama).
5. SMPLB (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa).
6. SMA (Sekolah Menengah Atas).
7. SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa).
8. SLB (Sekolah Luar Biasa).
9. SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)

Berikut syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah -sekolah jika ingin mendapatkan bantuan dana BOS ini:

- a. Melakukan dan mengisi kemutakhiran pada data dapodik harus secara keadaan yang nyata pada sekolah yang ada hingga 31 Agustus terakhir pengisiannya.
- b. Mempunyai Nomor pokok secara nasional yang tercatat di Dapodik
- c. Mendapatkan izin untuk bisa melakukan pembelajaran pada sekolah-sekolah yang didalamnya ada peserta didik dan terdata di dapodik
- d. Mempunyai jumlah siswa minimal 60 siswa dengan lamanya 3 tahun belakangan ini.
- e. Bukan Pendidikan sekolah yang melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Untuk besaran Dana BOS Reguler yang disalurkan tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang tercatat di Dapodik yang dikalikan dengan satuan biaya per masing-masing

tingkat pendidikan. Akan tetapi, nilai satuan BOS tiap sekolah akan berbeda tergantung dari daerah yang dihitung berdasarkan dua metode, yakni:

- Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistik, dan
- Indeks Besaran Peserta Didik (IPD) yaitu berdasarkan jumlah peserta didik per sekolah yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Hal tersebut terjadi karena ada sejumlah daerah yang kesulitan mendapatkan bahan baku untuk membangun sekolah maupun penyedia jasa konstruksi. Kondisi tersebut tentu saja akan berdampak terhadap operasional sekolah. Jadi, semakin sulit letak geografisnya, maka semakin tinggi pula IKK. Dengan demikian, nilai satuan dana BOS juga akan lebih tinggi. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi nomor 63 tahun 2022 tentang alokasi dana meliputi:

1. Besaran alokasi Dana BOP Kesetaraan Reguler sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOP Kesetaraan pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.
2. Satuan biaya sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
  - a. Rp 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) per 1 orang peserta didik PAUD setiap 1 tahun.
  - b. Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) per 1 orang peserta didik sekolah dasar setiap 1 tahun.
  - c. Rp 1.100.000 (Satu juta seratus ribu rupiah) per 1 orang peserta didik sekolah menengah pertama setiap 1 tahun.

- d. Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 orang peserta didik sekolah menengah atas setiap 1 tahun.
- e. Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per 1 peserta didik SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB setiap 1 tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) No. 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk dan Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), terdapat perbedaan yang signifikan dalam terkait penyaluran dan pelaporan dana BOSP dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2023 jadwal pencairan untuk Dana BOS hanya dibagi menjadi dua tahap saja yakni tahap satu 50 persen yang akan disalurkan paling cepat pada bulan Januari dan Tahap dua 50 persen yang akan disalurkan paling cepat pada bulan Juli.

Dana BOS digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS. Komponen penggunaan Dana BOS dimaksud meliputi:

- a. Penerimaan Peserta Didik baru;
- b. Pengembangan perpustakaan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- d. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran; asesmen dan evaluasi
- e. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
- f. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
- g. Pembiayaan langganan daya dan jasa;
- h. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;

- i. Penyediaan alat multimedia pembelajaran;
- j. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
- k. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan;  
dan/atau
- l. Pembayaran honor.  
  
(Peraturan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi Nomor  
63 Tahun 2022)

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan Tim BOS Sekolah dan tidak boleh untuk menggunakan Dana BOS regular untuk:

- a) Disimpan dengan maksud dibungkam
- b) Dipinjamkan kepada pihak lain
- c) Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS regular atau perangkat lunak lainnya yang sejenis
- d) Sewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan
- e) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah
- f) Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran
- g) Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah)
- h) Digunakan untuk pemeliharaan prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat.
- i) Membangun Gedung atau rungan baru
- j) Membeli saham

- k) Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOS regular atau perpajakan program BOS Regular yang diselenggarakan Lembaga diluar dinas Pendidikan provinsi, kabupaten/kota, atau kemeterian.
- l) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana pemerintah pusat, pemerintah daerah atau sumber lainnya.
- m) Melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Regular untuk kepentingan pribadi atau sekelompok tertentu.
- n) Bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan.  
(Peraturan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022)

### **2.2.3 Penatausahaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 53 Ayat 1 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan dikelola berdasarkan rencana kerja tahunan yang merupakan ringkasan rinci dari rencana kerja antara (RKM) satuan pendidikan ini telah digambarkan sebagai jangka waktu tetap 4 tahun. Rencana kerja awal tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan rencana kerja tahunan (RKT) yang dirinci dalam rencana anggaran dan kegiatan sekolah/guru (RAKS/M).

Penyusunan RAKS merupakan bentuk akhir dari perencanaan sekolah setiap tahun. RAKS ini memuat program sekolah dan alokasi anggaran selama setahun dengan menggunakan prinsip MBS. Dalam menyusun suatu program,

sekolah harus memperhatikan tujuan yang ingin dicapai yaitu peningkatan mutu yang juga menjadi tujuan MBS.

Penyusunan RAKS dilakukan setelah satuan Pendidikan melakukan susunan untuk menetapkan program-program, mempertanggung jawabkannya jadwal dan kegiatan setelah dilakukan perumusan didalamnya. Tahapan-tahapan yang digunakan saat Menyusun RAKS adalah dengan:

- 1) Mengerjakan rencana-rencana pada semua kebutuhan sekolah termasuk dana pada satuan pendidikan.
  - 2) Melakukan penyelarasan rencana-rencana terhadap dana pada sumber-sumber masuknya dana dari mana saja untuk satuan Pendidikan tersebut.
- (kemendikbud, 2012: 139)

Setelah RAKS selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah pengesahan dan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS/M) serta sosialisasi RAKS. RKS dan RAKS harus disetujui oleh rapat dewan pendidik, dengan memperhatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah. Sosialisasi dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait, khususnya orang tua dari peserta didik melalui pemasangan pengumuman di papan pengumuman sekolah dan melakukan rapat dengan orang tua peserta didik.

Terdapat alur penatausahaan dalam melaksanakan program BOS. Alur tersebut meliputi penerimaan, pengeluaran, dan pelaporan. Secara singkat penerimaan sekolah/madrasah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Pemerintah (BOS Pusat, DAK)
- b) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (BOSDA)

- c) Usaha mandiri sekolah/ madrasah
- d) Orang tua siswa
- e) Dunia usaha dan industri
- f) Sumber lain berupa hibah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku
- g) Yayasan penyelenggara pendidikan bagi lembaga pendidikan swasta  
(Kemendikbud, 2012: 168).

#### **2.2.4 Kebijakan Dasar Penyelenggaraan Program BOS**

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah.



- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai acuan dan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan mencari referensi untuk penelitian selanjutnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan isi penelitian yang sedang dilaksanakan agar mencapai memperluas teori yang akan dilakukan.

Table 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1	Rinda Herdiyani (2019), Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Sd Negeri Girirejo 02 Kec.Ngablak, Kab. Magelang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan RKAS tepat waktu diawal tahun anggaran, berdasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, serta melibatkan komite dan guru. Aspek pelaksanaan belum seluruhnya berhasil dikarenakan penyaluran dana BOS masih terlambat. administrasi pembukuan sudah sesuai dengan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
		Permendiknas No. 48 Tahun 2017. Tingkat efektivitas pengelolaan dana BOS pada SD Negeri Girirejo 02 mencapai 63%, berada dalam kriteria efektif.	metode penelitian deskriptif kualitatif. Selain itu penelitian terdahulu menggunakan teori Richard M. Steers sedangkan penelitian ini menggunakan teori Edward III. Lokasi penelitian terdahulu dengan penelitian ini juga berbeda.	
2	Nurul Annisa (2020), "Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar (Studi Kecamatan Kampar)"	Hasil penelitian ini mengatakan bahwa Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Kecamatan Kampar dalam kategori belum maksimal, dengan alasan bahwa didapat informasi yang kurang jelas dari pihak dinas, masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung dana terhadap operasional dana BOS.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian.	Persamaan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, sama-sama menggunakan teori George Edwards III, juga sama-sama mengulas tentang dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS).
3	Dyah Ayu Sekti Nurtyas Gigih Panganti (2021) "Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Gondanglegi Kabupaten Malang"	Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar ditinjau dari segi komunikasi yang berjalan dengan baik dan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian.	Persamaan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, sama-sama menggunakan teori George Edwards III, juga sama-sama

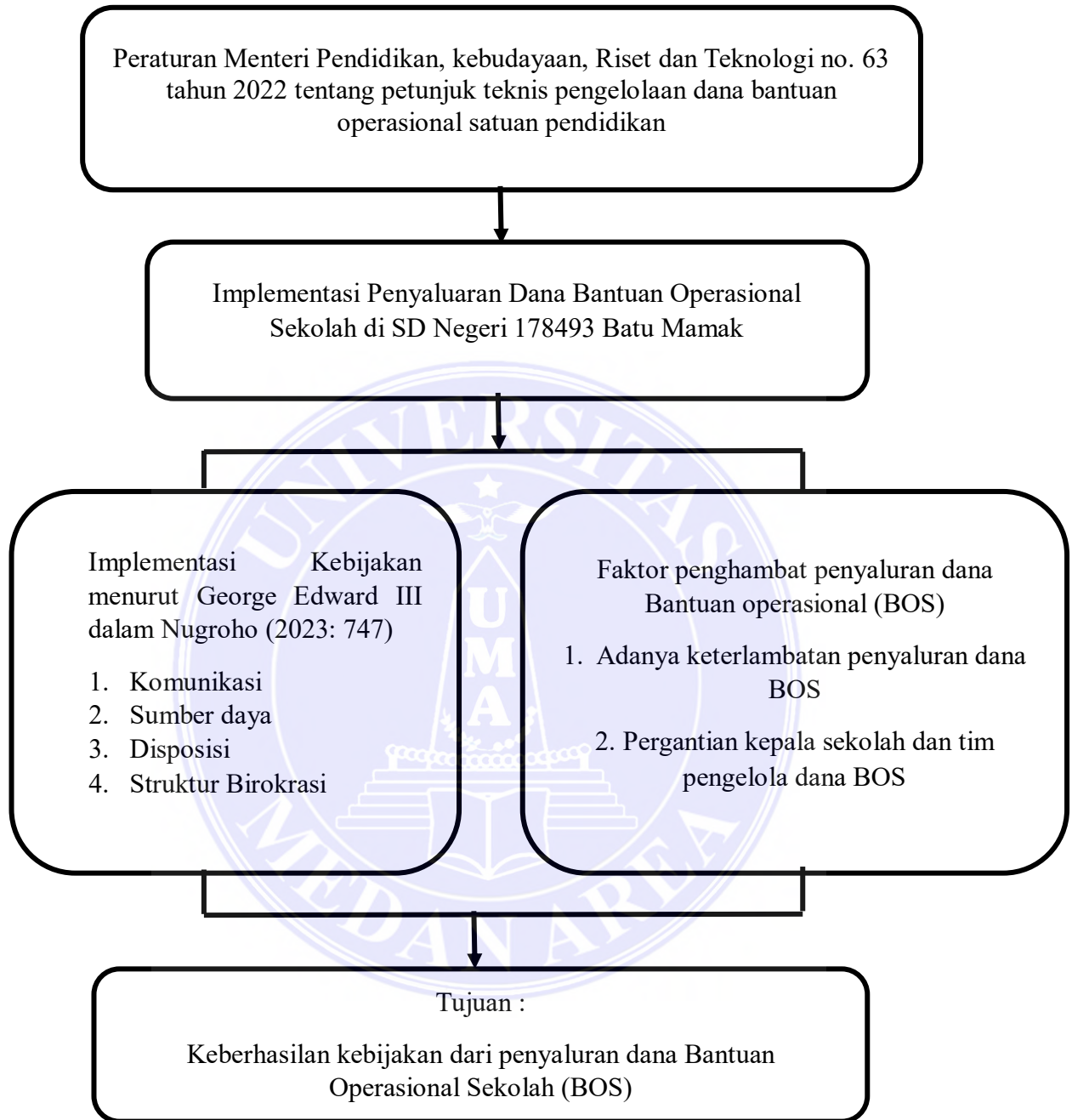
No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
		terstruktur dengan sumber daya yang memadai, menunjukkan komitmen (disposisi) dalam mensukseskan program dana BOS yang berjalan secara terstruktur mulai dari pusat sampai dinas pendidikan setempat sampai akhirnya ke sekolah.		mengulas tentang dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS).
4	Nuki Liza Lukita Permatasari (2022), "Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD Negeri 2 Singget Kabupaten Blora Jawa Tengah"	Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi program Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri 2 Singget sudah berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman pelaksanaan program yaitu juknis BOS 2020 yang telah ditetapkan. Komunikasi antar pelaksana sudah terjalin dengan lancar dan pelaksana program telah melaksanakan tanggungjawab dan tugas dengan baik. Meskipun ada kendala dimana pelaksana program mengalami kesulitan dalam pelaporan program BOS namun sudah ada tindakan dan bimbingan yang dilakukan oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Blora dalam mengatasi hal tersebut. Dengan adanya program dana BOS sangat membantu masyarakat untuk meringankan beban biaya Pendidikan dan membantu sekolah dalam membiayai kegiatan operasional sekolah guna mewujudkan tujuan negara Indonesia dalam memperbaiki kualitas sistem Pendidikan dan sekolah	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian.	Persamaan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, sama-sama menggunakan teori George Edwards III, juga sama-sama mengulas tentang dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS).

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
		gratis bagi masyarakat.		
5	Oni Sari Maranatha Silaban (2023), "Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SD Negeri 030306 Sidikalang"	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS di SD Negeri 030306 Sidikalang untuk meningkatkan mutu Pendidikan yang telah berjalan dengan cukup baik dibuktikan dengan program yang tepat sasaran, sosialisasi dana BOS yang telah berjalan, tercapainya tujuan program dan pemantauan program dana BOS yang telah berjalan dengan diawasi oleh internal dan eksternal. Faktor penghambat dalam pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 030306 Sidikalang yaitu terkait dengan sistem yang selalu berubah dan memaksa sekolah untuk selalu tanggap akan informasi dana BOS yang terbaru dan adanya pergantian operator baru disekolah ini.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian. Selain itu teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu teori Budiani sedangkan teori penelitian ini menggunakan teori Edward III.	Persamaan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, juga sama-sama mengulas tentang dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS).

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024

## 2.4 kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah alur pemikiran dari penulis sendiri dengan mengambil teori yang dianggap relevan dengan fokus atau judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah dalam rumusan penelitian. Kerangka berpikir bukan sekedar kumpulan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber atau juga bukan sekedar pemahaman dasar. Kerangka berpikir inilah yang pada akhirnya akan menjadi pemahaman dasar dan menjadi landasan bagi setiap pemikiran lainnya.



Gambar 1. Kerangka Berpikir  
Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu gejala yang ada dengan melihat Kondisi gejala tersebut berdasarkan apa yang terjadi pada saat penelitian dilakukan dilakukan langsung di lapangan. Menurut Mukhtar (2013: 10) metode penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan serta mengkaji masalah bagaimana implementasi penyaluran dana bantuan operasional sekolah di SD Negeri 178493 Batu Mamak. Sehingga memerlukan pengkajian berdasarkan kondisi nyata dilapangan untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif.

#### 3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada SD Negeri 178493 Batu Mamak yang beralamat di Batu Mamak, Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara.

Berikut tabel waktu pelaksanaan pengerjaan skripsi ini:

Tabel 3. Jadwal Pelaksanaan

No	Uraian Kegiatan	2023				2024								
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengajuan judul													
2	Penyusunan Proposal													
3	Seminar proposal													
4	Perbaikan proposal													
5	Pengambilan data/penelitian													
6	Penyusunan hasil penelitian													
7	Seminar hasil													
8	Revisi seminar hasil untuk skripsi													
9	Siding meja hijau													

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024

### 3.3 Informan Penelitian

Moleong (2018:132) mengatakan bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan adalah orang yang memberikan informasi ataupun yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana melalui informan dapat mengetahui segala informasi yang menjadi objek penelitian. Berikut informan atau narasumber yang diperlukan untuk penelitian yang akan dilakukan di SD Negeri 178493 Batu Mamak kabupaten Toba Samosir:

### 1. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang mempunyai informasi secara menyeluruh mengenai permasalahan yang diangkat peneliti. Informan kunci bukan sekadar mengetahui kondisi atau fenomena yang ada di masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Pihak yang dijadikan informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala sekolah SD Negeri 178493 Batu Mamak yaitu Ibu Dharma Ulina Siregar.

### 2. Informan Utama

Informan utama adalah informan yang mengetahui secara detail mengenai masalah penelitian yang akan diteliti. Informan utama berperan sebagai sumber data atau informasi primer dalam memberikan uraian teknis terkait masalah penelitian. Yang menjadi informan utama adalah bendahara atau pengelola dana BOS SD Negeri 178493 Batu Mamak

### 3. Informan Tambahan

Informan tambahan adalah informan yang digunakan sebagai sumber data atau informasi sekunder dalam memberikan gambaran pendukung data utama yang berkaitan dengan masalah penelitian. Informan tambahan dalam penelitian ini yaitu komite sekolah, guru-guru SD Negeri 178493 Batu Mamak dan orang tua siswa SD Negeri 178493 Batu Mamak.



Tabel 4. Daftar Informan Penelitian

No	Jabatan	Keterangan	Jumlah
1	Kepala sekolah SD Negeri 178493 Batu Mamak	Informan kunci	1
2	Bendahara SD Negeri 178493 Batu Mamak	Informan utama	1
3	Guru SD Negeri 178493 Batu Mamak	Informan tambahan	1
4	Komite SD Negeri 178493 Batu Mamak	Informan tambahan	1
5	Orang tua siswa SD Negeri 178493 Batu Mamak	Informan tambahan	3

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2017: 224) mengartikan teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam menjawab rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan relevansi untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam penelitian, antara lain:

#### 1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data dan informasi akurat sesuai pedoman observasi. Dalam observasi langsung, pengumpulan data dilakukan dengan cara peneliti merekam langsung objek yang diteliti atau diamati.

## 2. Wawancara

Sugiyono (2013:188) mengartikan wawancara sebagai suatu teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada orang yang. Peneliti melakukan tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan terstruktur langsung kepada responden yang dianggap memahami, mengetahui dan menjadi bagian dari penelitian ini.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari informasi tentang sesuatu yang berkaitan dengan masalah oleh peneliti yang terdiri dari catatan penting, transkrip, buku, dan lainnya. Selain bentuk dokumentasi di atas, bentuk lainnya adalah foto dan bahan statistik. Dokumentasi disini yaitu mempelajari arsip-arsip yang ada kaitannya dengan penelitian seperti Penyaluran Dana BOS, surat-surat yang berhubungan dengan Penyaluran Dana BOS, Peraturan-peraturan yang Mengatur Dana BOS, Dokumen-dokumen tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana BOS dan lain sebagainya.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Proses pengumpulan data merupakan langkah utama yang harus diselesaikan dalam penelitian. Teknik analisis data merupakan serangkaian metode dan prosedur digunakan untuk menganalisis, menginterpretasi, dan memperoleh wawasan dari data yang dikumpulkan. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyaring data hasil wawancara dan observasi kemudian diinterpretasikan agar mudah dimengerti untuk dijelaskan.

Menurut Moleong (2017:280-281) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman, juga dikenal sebagai analisis interaktif. Di dalam Model analisis data Miles dan Huberman memiliki tiga langkah, yaitu:

### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. Dengan cara ini data yang dikurangi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mencarinya bila diperlukan.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan bentuk rancangan informasi hasil penelitian di lapangan yang tersusun dan mudah dipahami. Dalam hal ini peneliti menyajikan data dengan penyederhanaan informasi untuk membuatnya lebih mudah untuk dijelaskan. Penyajian data digunakan dalam bentuk teks naratif agar lebih mudah dalam pemaparan dan penarikan kesimpulan.

### 3. Verifikasi Atau Penarikan Kesimpulan

Verifikasi merupakan penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

Kesimpulan tersebut diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian

yang diajukan. Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada saat proses pengumpulan data, namun diperlukan verifikasi sehingga benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri 178493 Batu Mamak Kabupaten Toba belum sepenuhnya efektif meskipun sudah sesuai dengan Petunjuk teknis (juknis) yang berlaku. Karena pada indikator komunikasi, SD Negeri 178493 Batu Mamak tidak pernah memberikan sosialisasi kepada orang tua siswa. Dan untuk indikator sumber daya SD Negeri 178493 Batu Mamak merupakan guru yang sekaligus merangkap sebagai staf pengelola dana BOS. Namun dalam indikator disposisi dan struktur birokrasi sudah terlaksana dengan baik dimana staf pengelola dana BOS diberi monitoring dan evaluasi agar tidak melakukan kesalahan dalam membuat laporan. Selain mereka juga diberi SK untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan Juknis.
2. Faktor penghambat dalam pengimplementasian penyaluran dana BOS yaitu adanya keterlambatan penyaluran dana BOS dari pusat yang membuat sekolah mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Sehingga sekolah melakukan pinjam kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan juga adanya pergantian kepala sekolah dan tim pengelola Dana BOS.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan maka dalam hal ini peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan RAPBS sekolah sebaiknya ikut melibatkan orang tua/wali murid agar orang tua/wali murid memiliki peran dalam keberhasilan pengelolaan dana BOS disekolah.
2. Ada baiknya jika petugas pengelola dana BOS memiliki Pendidikan ekonomi/akutansi agar mempermudah dalam membuat laporan pengelolaan dana BOS dan SPJ.
3. Dalam pengelolaan dana BOS diharapkan sekolah harus mengikuti dan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku agar penggunaan dana BOS efektif dan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, Said Zainal. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2015). *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Nugroho, Riant. (2023). *Public Policy, Edisi Digital*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syahrudin. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media.
- Syaukani, dkk. (2004). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wahab, Solichin Abdul. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. (2021). *Analisis Kebijakan Publik*. Jawa Timur: Media Nusa Creative.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

### Jurnal

- Akib, Haedar. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Gunawan, I. G. H., Sumada, I. M., & Suargita, I. N. (2021). Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *Widyanata*, 18(1), 21-29.
- Kotimah, K., & Sukmana, H. (2023). Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Dana Sekolah (BOS) di SDN Kedungbanteng Tanggulangin. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 12(1), 112-118.

- Masruroh, M., & Fitriani, S. (2021). Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Smk Ypk Kesatuan Jakarta. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(2), 551-562.
- Rokim, R. (2019). Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya Dalam Pendidikan Islam. *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 60-69.
- Sutmasa, Yosep Gede. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25-36.
- Syahida, Agung Bayu. 2014. Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjung Pinang (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Unggat)

### **Skripsi**

- Anissa, N. (2019). *Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar (Studi Kecamatan Kampar)* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Herdiyani, R. (2019). *Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD Negeri Girirejo 02 Kec. Ngablak, Kab. Magelang*. Universitas Negeri Malang.
- Panganti, Dyah Ayu Sekti Nurtyas Gigih (2021). *Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Gondanglegi Kabupaten Malang* (Tesis, Universitas Brawijaya).
- Permatasari, N. L. L. (2022). *Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Sd Negeri 2 Singget Kabupaten Blora Jawa Tengah*. Universitas Tidar.
- Putriyani, Nindi. (2018). *Implementasi program bantuan operasional sekolah tahun 2016 pada jenjang pendidikan sekolah dasar di upt dinas pendidikan dan kebudayaan kecamatan karangtanjung kabupaten pandeglang*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Silaban, Oni Sari Maranatha. (2023). *Efektivitas Pengelolaan Dana Bos dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Negeri 030306 Sidikalang*. Universitas Medan Area.
- Sudarsono. (2021). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang*. (Tesis, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang)

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 2 tentang *kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan warga negaranya*.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *sistem pendidikan nasional*.



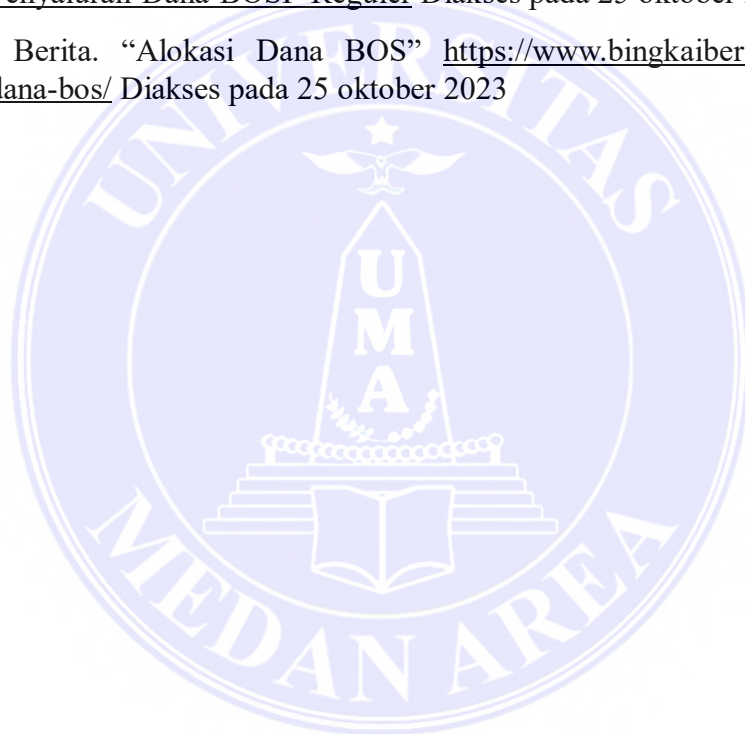
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 63 Tahun 2022 tentang *Petunjuk Teknis Pengolahan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan*.

### Sumber Internet

Asmoni's Blog. 2009. "Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Bos Terhadap Peningkatan Mutu Sekolah" <https://asmoni.wordpress.com/implementasi-dana-bantuan-operasional-sekolah-bos-terhadap-peningkatan-mutu-sekolah/> Diakses pada 20 oktober 2023

Arkas "Perubahan Mekanisme dan Syarat Penyaluran dana BOSP regular" <https://pusatinformasi.rkas.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/16034034735897-Perubahan-Mekanisme-dan-Syarat-Penyaluran-Dana-BOSP-Reguler> Diakses pada 25 oktober 2023

Bingkai Berita. "Alokasi Dana BOS" <https://www.bingkaiberita.com/alokasi-dana-bos/> Diakses pada 25 oktober 2023



## LAMPIRAN

### Lampiran I Pedoman wawancara

No	Indikator	Daftar Pertanyaan
1.	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Penyaluran Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 178493 Batu Mamak sudah optimal?</li> <li>2. Bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam mensosialisasikan kebijakan BOS kepada orang tua siswa?</li> <li>3. Apakah pernah terjadi missskomunikasi dalam penyampaian informasi kebijakan baik kepada pelaksana atau masyarakat?</li> </ol>
2.	Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada berapakah jumlah pelaksana Program BOS di SDN 178493 Batu Mamak?</li> <li>2. Apakah kemampuan para pelaksana kebijakan BOS sudah mempuni/mencukupi?</li> <li>3. Apakah Informasi terkait dengan pelaksanaan atau penyaluran program Dana BOS dapat dipahami oleh seluruh pelaksana di SDN 178493 Batu Mamak?</li> <li>4. Sarana dan prasarana serta kelengkapan apa saja yang disediakan untuk menunjang implementasi kebijakan BOS ini?</li> </ol>
3	Disposisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pemilihan dan pengangkatan para pelaksana program BOS?</li> <li>2. Bagaimana proses pembagian tugas dan koordinasi antara para pelaksana kebijakan BOS di SDN 178493 Batu Mamak?</li> </ol>
4	Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah penyaluran atau pengelolaan Dana</li> </ol>

		<p>BOS sudah mengikuti dan sesuai dengan SOP atau petunjuk teknis yang telah ditetapkan?</p> <p>2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penyaluran atau pengelolaan Dana BOS di SDN 178493 Batu Mamak?</p> <p>3. Upaya apa yang dilakukan pelaksana program dalam mengatasi masalah atau hambatan dalam penyaluran atau pengelolaan program Dana BOS?</p>
--	--	--



## Lampiran Hasil Wawancara

### Implementasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri 178493 Batu Mamak Kabupaten Toba

#### Informan I (Informan Utama)

Nama : Dharma Ulina Siregar S.Pd

Jabatan : Kepala Sekolah

Hari/Tanggal : Jumat, 16 Februari 2024

Waktu : 09.00 - Selesai

Tempat : SD Negeri 178493 Batu Mamak

1. Apakah Penyaluran Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 178493 Batu Mamak sudah optimal?

Jawaban : “Menurut saya sudah optimal, dimana kami telah berusaha untuk melakukan dan melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana BOS yang diterima SD Negeri 178493 Batu Mamak. Dan pastinya dalam penyaluran dan pengelolaan dana BOS ini kami melakukannya berdasarkan juknis yang dan pedoman yang ada. Sehingga dalam penyaluran dan pengelolaan dana BOS telah dilaksanakan dengan optimal.”

2. Bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam mensosialisasikan kebijakan BOS kepada orang tua siswa?

Jawaban : “Sebenarnya untuk sosialisasi kepada orang tua atau wali murid memang kami tidak melakukannya. Karena menurut kami para orang tua ataupun wali murid sudah mempercayakannya kepada kami segala pengelolaan dan penyaluran dana BOS yang diterima oleh sekolah. Selain itu juga selama ini tidak ada komplain yang diberikan oleh wali murid terkait pengelolaan dana BOS di SD Negeri 178493 Batu Mamak.”

3. Apakah pernah terjadi misskomunikasi dalam penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat?

Jawaban : “Tidak, untuk sejauh ini belum pernah ada misskomunikasi maupun Komplain yang diberikan orang tua atau wali murid kepada sekolah.”

4. Ada berapakah jumlah pelaksana Program BOS di SDN 178493 Batu Mamak?

Jawaban : “Untuk jumlah anggota pelaksana ataupun tim BOS yang ada di SD Negeri 178493 Batu Mamak ini ada tiga. Diantaranya yaitu saya sebagai kepala sekolah merupakan penanggung jawab dari pengelolaan dan penyaluran dana BOS ini. Yang pastinya saya dibantu oleh Bendahara untuk membuat dan merancang RKAS atau SPJ dan laporan penggunaan dana BOS di sekolah ini. Kami juga memiliki operator untuk menginput semua data dan laporan kedalam sistem. Dan Tim BOS atau pelaksana BOS sudah diberikan SK sebagai acuan dalam melaksanakan tugas.”

5. Apakah kemampuan para pelaksana kebijakan BOS sudah mempuni/mencukupi?

Jawaban : “Sudah, menurut saya kemampuan dari pada tim pelaksana sudah mencukupi. Dimana walaupun tim BOS memiliki Pendidikan yang berbeda dengan yang dibutuhkan dan tim BOS juga guru yang merangkap sebagai tim BOS. Namun kami sudah berusaha dan bekerja dengan baik untuk melaksanakan tugas yang diberi.”

6. Apakah Informasi terkait dengan pelaksanaan atau penyaluran program Dana BOS dapat dipahami oleh seluruh pelaksana di SDN 178493 Batu Mamak?

Jawaban : “Sejauh ini sudah dipahami oleh para Tim BOS atau pelaksana BOS. Dimana kami juga diberikan monitoring dan juga evaluasi oleh Pemerintah dari Dinas terkait. Dimana monitoring dan evaluasi ini diberikan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS.”

7. Sarana dan prasarana serta kelengkapan apa saja yang disediakan untuk menunjang implementasi kebijakan BOS ini?

Jawaban : “Tentu, kami menyediakan laptop bagi Para Tim BOS untuk menunjang dan mendukung kinerja Tim BOS dalam melaksanakan tugas.”

8. Bagaimana pemilihan dan pengangkatan para pelaksana program BOS?

Jawaban : “Untuk hal ini sudah ditentukan dari pusat bahwa kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sebagai pengelola keuangan, dan operator sebagai penginput data.”

9. Bagaimana proses pembagian tugas dan koordinasi antara para pelaksana kebijakan BOS di SDN 178493 Batu Mamak?

Jawaban : “Untuk pembagian tugas dan koordinasi pelaksana kebijakan itu berdasarkan juknis yang telah ditetapkan dan mereka juga diberi SK untuk pelaksanaan.”

10. Apakah penyaluran atau pengelolaan Dana BOS sudah mengikuti dan sesuai dengan SOP atau petunjuk teknis yang telah ditetapkan?

Jawaban : “Sudah sesuai, pastinya untuk pelaksanaan dan penyaluran dana BOS tentunya harus berdasarkan petunjuk teknis BOS yang ada, dimana pemerintah sudah berkomitmen bahwa pelaksanaan dana BOS haruslah berdasarkan pedomanan BOS yang sudah diberikan kepada semua sekolah penerima dana BOS. Tentunya SD Negeri 178493 Batu Mamak sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mewujudkan program sekolah gratis melalui dana BOS akan melaksanakan program BOS ini sesuai aturan dana pedomana yang telah diberikan.”

11. Apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penyaluran atau pengelolaan Dana BOS di SDN 178493 Batu Mamak?

Jawaban : “Untuk hambatan yang ada itu seperti adanya keterlambatan penyaluran dana BOS yang diberikan kepada SD Negeri 178493 Batu Mamak sehingga kami harus meminjam untuk memenuhi kebutuhan sekolah.”

12. Upaya apa yang dilakukan pelaksana program dalam mengatasi masalah atau hambatan dalam penyaluran atau pengelolaan program Dana BOS?

Jawaban : “untuk mengatasi keterlambatan penyaluran dana BOS dalam memenuhi kebutuhan sekolah kami melakukan kerja sama dengan tokoh ATK dengan mengambil barang yang dibutuhkan di sekolah kemudian akan dibayar Ketika dana BOS sudah dcairkan, ini biasanya disebut rekanan.”

## Lampiran Hasil Wawancara

### Implementasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri 178493 Batu Mamak Kabupaten Toba

#### Informan II (Informan Kunci)

Nama : Masta Hotmaida Sinaga S.Pd

Jabatan : Bendahara

Hari/Tanggal : Jumat, 16 Februari 2024

Waktu : 10.00 - Selesai

Tempat : SD Negeri 178493 Batu Mamak

1. Apakah Penyaluran Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 178493 Batu Mamak sudah optimal?

Jawaban : “Sudah optimal. Dalam melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana BOS kami melakukannya berpedoman dan sesuai dengan juknis atau peraturan yang ada. Petunjuk teknis ini yang akan kami gunakan untuk membuat laporan pertanggung jawaban dari penggunaan anggaran BOS serta petunjuk teknis ini akan menjadi Panduan bagi kami dalam mengimplementasikan Program BOS. Dengan adanya juknis ini kami dapat melaksanakan tugas dengan baik dan optimal.”

2. Bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam mensosialisasikan kebijakan BOS kepada orang tua siswa?

Jawaban : “Untuk sosialisasi kepada orang tua atau wali murid kami tidak melakukannya. Dimana dalam rapat mengenai penyaluran serta pengelolaan dana BOS biasanya hanya dihadiri oleh kepala sekolah Bendahara, Operator, Komite dan juga guru. Karena menurut kami para orang tua ataupun wali murid sudah mempercayakannya kepada kami segala pengelolaan dan penyaluran dana BOS yang diterima oleh sekolah.”

3. Apakah pernah terjadi missskomunikasi dalam penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat?

Jawaban : “Belum pernah ada missskomunikasi maupun Komplain yang diberikan orang tua atau wali murid kepada sekolah. Hal mungkin

dikarenakan orang tua sudah mempercayakan segala pengelolaan dan penyaluran dana BOS kepada kami.”

4. Ada berapakah jumlah pelaksana Program BOS di SDN 178493 Batu Mamak?

Jawaban : “Ada tiga dan pastinya kepala sekolah sebagai penanggung jawab pengelolaan dana BOS. Dan saya sendiri sebagai pengelola keuangan dan membuat laporan seperti RKAS dan juga SPJ terkait penggunaan dana BOS disekolah ini. Serta dalam pengimputan laporan yang saya buat, saya dibantu oleh operator. Dan untuk melaksanakan tugas ini saya telah diberi SK oleh kepala sekolah untuk mengelolah dana BOS.”

5. Apakah kemampuan para pelaksana kebijakan BOS sudah mempuni/mencukupi?

Jawaban : “Saya sebagai bendahara sudah berusaha dalam melaksanakan tugas dengan baik. walau sering ada kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan dikarenakan saya juga adalah seorang guru dan bukan lulusan akuntan. Namun saya akan belajar dan menyesuaikannya.”

6. Apakah Informasi terkait dengan pengelolaan atau penyaluran Dana BOS dapat dipahami oleh seluruh pelaksana di SDN 178493 Batu Mamak?

Jawaban : “Untuk menegenai pengelolaan dan penyaluran dana BOS sudah dipahami. Dikarenakan kami juga mendapat monitoring dan evaluasi dari dinas Pendidikan. Hal ini dilakukan agar kami tidak melakukan kesalahan dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS.”

7. Sarana dan prasarana serta kelengkapan apa saja yang disediakan untuk menunjang implementasi kebijakan BOS ini?

Jawaban : “Pastinya kami disediakan laptop bagi Para Tim BOS untuk menunjang dan mendukung kinerja Tim BOS dalam melaksanakan tugas. Terutama saya sebagai bendahara sangat memerlukan laptop dalam membuat laporan atau SPJ.”

8. Bagaimana pemilihan dan pengangkatan para pelaksana program BOS?

Jawaban : “Untuk ini sudah ditentukan Juknis bahwa ada tiga pelaksana yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara



sebagai pengelola keuangan, dan operator sebagai penginput data.”

9. Bagaimana proses pembagian tugas dan koordinasi antara para pelaksana kebijakan BOS di SDN 178493 Batu Mamak?

Jawaban : “Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa Kepala Sekolah bertugas sebagai penanggung jawab dan saya bendahara bertugas sebagai pengelola keuangan dan membuat RKAS dan juga SPJ. Dan untuk operator sendiri bertugas menginput laporan keuangan dan RKAS yang telah saya buat.”

10. Apakah penyaluran atau pengelolaan Dana BOS sudah mengikuti dan sesuai dengan SOP atau petunjuk teknis yang telah ditetapkan?

Jawaban : “Tentu, dalam pelaksanaan dan penyaluran dana BOS haruslah berdasarkan petunjuk teknis BOS yang ada. Dimana berdasarkan Juknis untuk penyaluran dana BOS dilakukan dalam 2 tahap, dimana tahap pertama sebesar 50% paling cepat awal bulan Januari dan tahap kedua 50% paling cepat awal bulan Juni. Dana BOS akan diterima langsung melalui nomor rekening sekolah yang sudah terdaftar di Dapodik. Dana BOS yang diterima akan digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah atau sesuai dengan RKAS yang telah dibuat. Dan pastinya untuk menggunakan dan mengelola dana BOS ini pemerintah melalui dinas terkait melakukan monitoring dan evaluasi agar sesuai dengan juknis.”

11. Apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penyaluran atau pengelolaan Dana BOS di SDN 178493 Batu Mamak?

Jawaban : “Memang ada keterlambatan dari dana BOS yang di salurkan, yang dimana ini mengakibatkan sekolah bingung untuk menutupi keterlambatan pencairan dana BOS dan ini juga mengakibatkan adanya keterlambatan pihak sekolah untuk melapor penggunaan dana BOS yang ada.”

12. Upaya apa yang dilakukan pelaksana program dalam mengatasi masalah atau hambatan dalam penyaluran atau pengelolaan program Dana BOS?

Jawaban : “Untuk mengatasi keterlambatan penyaluran dana BOS dalam memenuhi kebutuhan, sekolah akan meminta bantuan komite sekolah untuk mencari pinjaman.”

## Lampiran Hasil Wawancara

### Implementasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri 178493 Batu Mamak Kabupaten Toba

#### Informan III (Informan Tambahan)

Nama : Dapot Simangunsong

Jabatan : Komite Sekolah

Hari/Tanggal : Jumat, 16 Februari 2024

Waktu : 11.00 - Selesai

Tempat : SD Negeri 178493 Batu Mamak

1. Apakah Penyaluran Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 178493 Batu Mamak sudah optimal?

Jawaban : “Sudah optimal. Dalam melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana BOS kami melakukannya berpedoman dan sesuai dengan juknis atau peraturan yang ada. Dengan adanya juknis ini kami dapat kami dapat melaksanakan tugas dengan baik.”

2. Bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam mensosialisasikan kebijakan BOS kepada orang tua siswa?

Jawaban : “Untuk sosialisasi kepada orang tua siswa memang tidak ada. Tapi dalam pelaksanaa rapat saya ikut serta dalam membahas RKAS. Yang dimana sekolah telah menyampaikan pengelolaan dan penyaluran dana BOS dengan jelas.”

3. Apakah pernah terjadi misskomunikasi dalam penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat?

Jawaban : “Untuk misskomunikasi antara orang tua atau wali murid dengan sekolah tidak ada. Dan juga Orang tua atau wali murid tidak pernah menyampaikan Komplain kepada saya.”

4. Bagaimana fasilitas yang diberikan SD Negeri 178493 Batu mamak?

Jawaban : “Untuk fasilitas yang diberikan oleh SD Negeri 178493 Batu

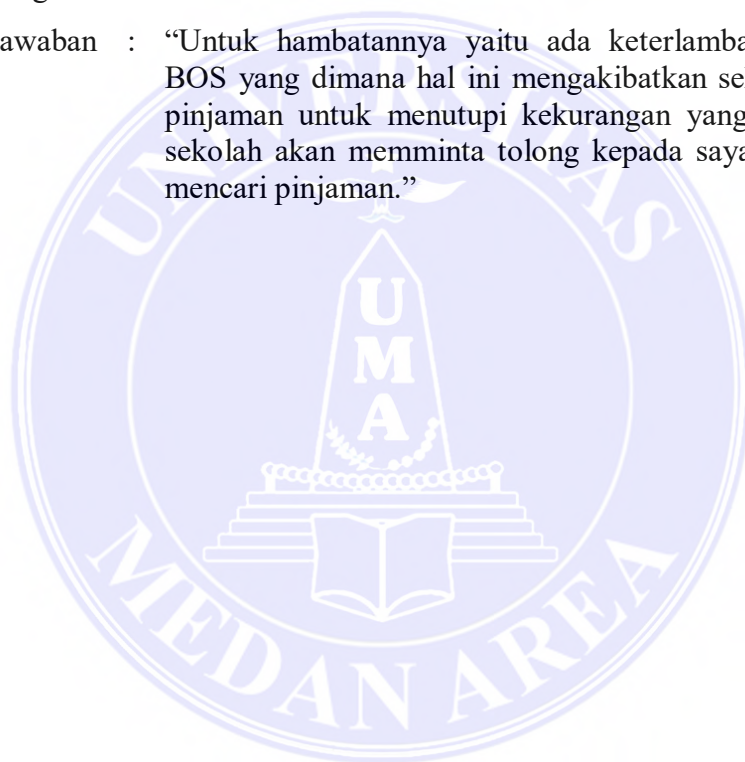
mamak sudah memenuhi seperti adanya kelengkapan buku, ruang kelas yang memadai dan perpustakaan.”

5. Adakah pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua atau wali murid yang dianggap membebani?

Jawaban : “Sejauh ini tidak ada pungutan yang dilakukan oleh sekolah kepada orang tua atau wali murid. Karena dana BOS yang diberi kepada SD Negeri 178493 Batu Mamak sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sekolah.”

6. Apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penyaluran atau pengelolaan Dana BOS di SDN 178493 Batu Mamak?

Jawaban : “Untuk hambatannya yaitu ada keterlambatan pencairan dana BOS yang dimana hal ini mengakibatkan sekolah harus mencari pinjaman untuk menutupi kekurangan yang ada. Dan biasanya sekolah akan meminta tolong kepada saya membantu sekolah mencari pinjaman.”



## Lampiran Hasil Wawancara

### Implementasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri 178493 Batu Mamak Kabupaten Toba

#### Informan III (Informan Tambahan)

Nama : Dorlina Simanjuntak S.Pd

Jabatan : Guru

Hari/Tanggal : Jumat, 16 Februari 2024

Waktu : 11.30 - Selesai

Tempat : SD Negeri 178493 Batu Mamak

1. Bagaimana tanggapan Ibu terkait penyaluran dan pengelolaan BOS di sekolah ini?

Jawaban : “Menurut saya penyaluran dan pengelolaan dana BOS di SD Negeri 178493 Batu Mamak sudahlah dilaksanakan sesuai dengan juknis yang ada.”

2. Apakah Ibu mengetahui penggunaan dana BOS yang terjadi di sekolah ini?

Jawaban : “Tentu saya mengetahuinya karena dalam mengelola dana BOS sekolah akan dilaksanakan rapat untuk membahas terkait penyaluran ataupun penggunaan dana BOS dalam setahun. Dimana penggunaan dana BOS tersebut akan dibuat dalam bentuk RKAS.”

3. Apakah penyaluran atau pengelolaan Dana BOS sudah mengikuti dan sesuai dengan SOP atau petunjuk teknis yang telah ditetapkan?

Jawaban : “Pastinya pemerintah selalu berkomitmen dalam pelaksanaan dan penyaluran dana BOS ini haruslah sesuai dengan ketentuan atau juknis yang telah ditetapkan tanpa adanya penyimpangan.”

## Lampiran Hasil Wawancara

### Implementasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri 178493 Batu Mamak Kabupaten Toba

#### Informan III (Informan Tambahan)

Nama : Heddi Sinaga

Jabatan : Orang tua murid

Hari/Tanggal : Senin, 19 Februari 2024

Waktu : 09.00 - Selesai

Tempat : Rumah Ibu Heddi Sinaga

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang kebijakan Dana BOS di SDN 178493 Batu Mamak?

Jawaban : “Untuk kebijakan dana BOS Di SD Negeri 178493 Batu Mamak saya tidak mengetahuinya.”

2. Adakah sosialisasi yang dilaksanakan pihak sekolah SDN 178493 Batu Mamak?

Jawaban : “Sejauh ini saya belum pernah menerima sosialisasi yang dilakukan oleh SD Negeri 178493 Batu Mamak.”

3. Bagaimana fasilitas yang diberikan SDN 178493 Batu Mamak?

Jawaban : “Menurut saya sudah lengkap, dimana ruangan kelas yang memadai, siswa juga diberi buku dan ada perpustakaan.”

4. Adakah masalah atau hambatan dalam pelayanan di SDN 178493 Batu Mamak? seperti pungutan dari pihak sekolah yang di anggap membebani?

Jawaban : “Selama anak saya bersekolah di SD Negeri 178493 Batu Mamak belum pernah ada pungutan yang dilakukan oleh sekolah. Kecuali jika ada murid yang kemandirian dan itupun memang seharusnya kita bantu dengan seiklas kita. Jadi untuk pungutan yang memberatkan orang tua murid belum ada menurut saya.”

5. Apa saja manfaat yang sudah dirasa oleh Bapak/Ibu dengan adanya dana BOS?

Jawaban : Menurut saya sudah lengkap, dimana ruangan kelas yang memadai, siswa juga diberi buku dan ada perpustakaan.



## Lampiran Hasil Wawancara

### Implementasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri 178493 Batu Mamak Kabupaten Toba

#### Informan III (Informan Tambahan)

Nama : Holong Siagian  
Jabatan : Orang tua murid  
Hari/Tanggal : Senin, 19 Februari 2024  
Waktu : 10.00 - Selesai  
Tempat : Rumah bapak Holong Siagian

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang kebijakan Dana BOS di SDN 178493 Batu Mamak?

Jawaban : “Saya kurang mengerti mengenai dana BOS di SD Negeri 178493 Batu Mamak. Saya hanya mengetahui bahwa dana BOS digunakan untuk mengelola kebutuhan sekolah.”

2. Adakah sosialisasi yang dilaksanakan pihak sekolah SDN 178493 Batu Mamak?

Jawaban : “Untuk sosialisasi sepertinya sekolah tidak ada melakukannya karena saya belum pernah mendapat panggilan sosialisasi dari sekolah. Pasti Saya berharap sekolah melaksanakan sosialisasi agar penggunaan dana BOS transparansi.”

3. Bagaimana fasilitas yang diberikan SDN 178493 Batu Mamak?

Jawaban : “Sudah lengkap baik dari ruang kelas, buku, toilet dan perpustakaan.”

4. Adakah masalah atau hambatan dalam pelayanan di SDN 178493 Batu Mamak? seperti pungutan dari pihak sekolah yang di anggap membebani?

Jawaban : “Dengan adanya dana BOS ini, sekolah tidak pernah melakukan pungutan kepada orang tua murid karena semua sudah ditanggung oleh dana BOS.”

5. Apa saja manfaat yang sudah dirasa oleh Bapak/Ibu dengan adanya dana BOS?

Jawaban : “saya sebagai orang tua tidak perlu membeli buku cetak untuk pembelajaran anak saya, karena sudah diberikan oleh sekolah.”





## Lampiran Hasil Wawancara

### Implementasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri 178493 Batu Mamak Kabupaten Toba

#### Informan III (Informan Tambahan)

Nama : Udur Simbolon  
Jabatan : Orang tua murid  
Hari/Tanggal : Senin, 19 Februari 2024  
Waktu : 11.00 - Selesai  
Tempat : Rumah Ibu Udur Simbolon

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang kebijakan Dana BOS di SDN 178493 Batu Mamak?

Jawaban : “Saya tidak tahu dan tidak paham mengenai dana BOS di SD Negeri 178493 Batu Mamak.”

2. Adakah sosialisasi yang dilaksanakan pihak sekolah SDN 178493 Batu Mamak?

Jawaban : “Saya tidak pernah menerima undangan dari sekolah untuk menghadiri rapat ataupun sosialisasi dan sepertinya sekolah memang tidak melakukan sosialisasi kepada orang tua murid.”

3. Bagaimana fasilitas yang diberikan SDN 178493 Batu Mamak?

Jawaban : “Menurut saya sudah cukup lengkap dimana SD Negeri 178493 Batu Mamak memiliki ruang kelas yang memadai, juga toilet dan perpustakaan.”

4. Adakah masalah atau hambatan dalam pelayanan di SDN 178493 Batu Mamak? seperti pungutan dari pihak sekolah yang di anggap membebani?



Jawaban : “Saya tidak pernah menerima pungutan dari sekolah.”

5. Apa saja manfaat yang sudah dirasa oleh Ibu dengan adanya dana BOS?

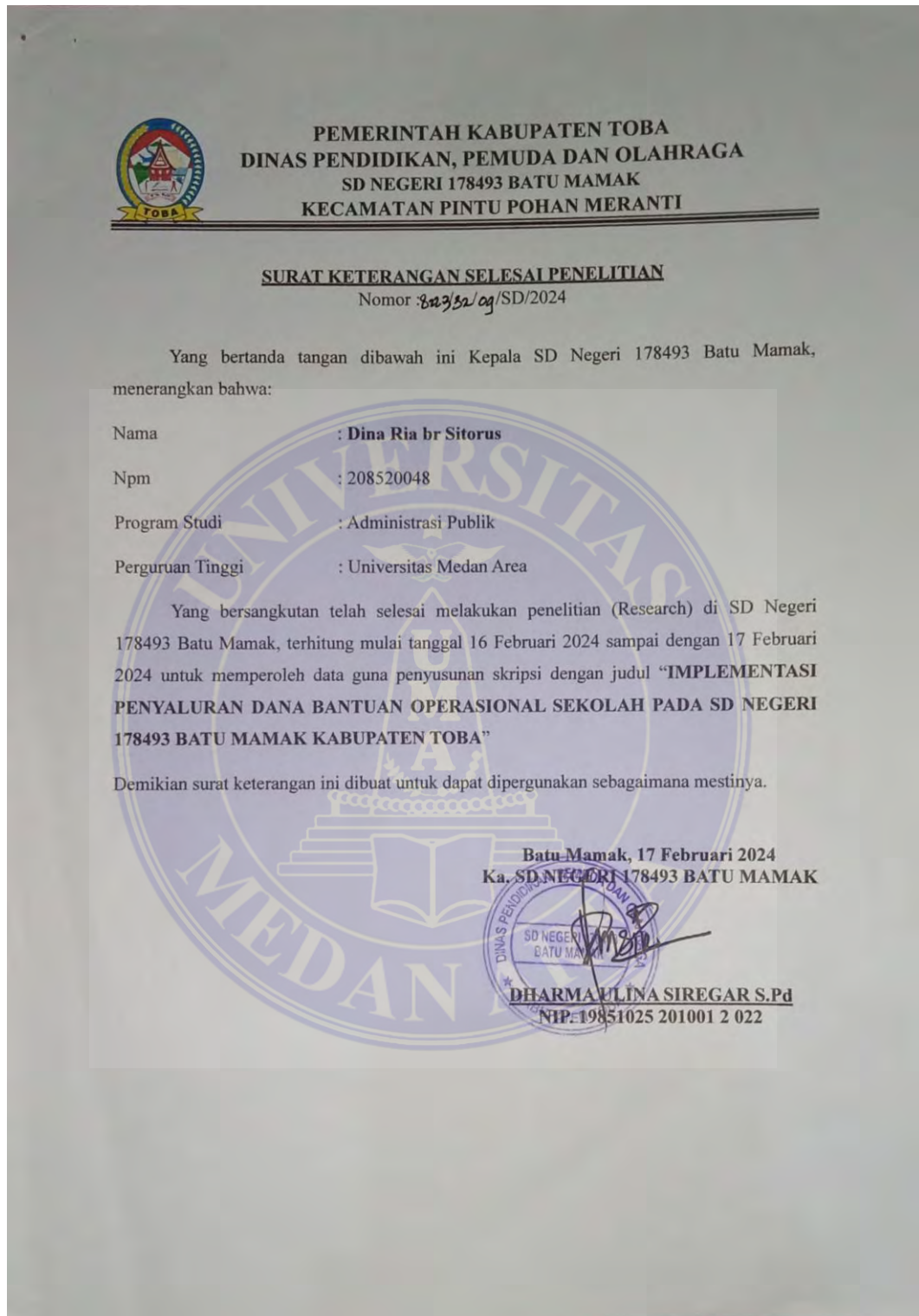
Jawaban : “Manfaat yang saya rasakan yaitu pastinya murid tidak perlu membeli buku cetak untuk menunjang pembelajaran karena itu sudah dilengkapi dengan dana BOS.”



## LAMPIRAN II SURAT IZIN PENELITIAN

	<b>UNIVERSITAS MEDAN AREA</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Ser Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122 Website: <a href="http://www.uma.ac.id">www.uma.ac.id</a> E-Mail: <a href="mailto:univ_medanarea@uma.ac.id">univ_medanarea@uma.ac.id</a>	
Nomor	: 248/FIS.2/01.7/1/2024	Medan, 26 Januari 2024
Lampiran	: -	
Hal	: Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset	
Kepada Yth. Kepala SD Negeri 178493 Batu Mamak Di Tempat		
Dengan hormat, Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :		
Nama	: Dina Ria br Sitorus	
NIM	: 208520048	
Program Studi	: Administrasi Publik	
Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada SD Negeri 178493 Batu Mamak untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :		
<i>" Implementasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri 178493 Batu Mamak Kabupaten Toha Samosir "</i>		
Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.		
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.		
 Dekan, Walid Musthafa S, S.Sos, M.I.P.		
Tembusan:		
1. Ka. Prodi Administrasi Publik		
2. Mahasiswa ybs		
3. Arsip		

### LAMPIRAN III SURAT SELESAI PENELITIAN



## LAMPIRAN IV DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara Bersama Ibu Dharma Ulina Siregar S.Pd  
(Kepala Sekolah SD Negeri 178493 Batu Mamak)



Dokumentasi wawancara Bersama Ibu S.Pd  
(Bendahara SD Negeri 178493 Batu Mamak)

## DOKUMENTASI



Dokumentasi Bersama Bapak Dapot Simangunsong  
(Komite SD Negeri 178493 Batu Mamak)



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Dorlina Simanjuntak S.Pd  
(Guru SD Negeri 178493 Batu Mamak)

## DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara Bersama Ibu Udur Simbolon  
(Orang tua murid)



Dokumentasi wawancara Bersama Ibu Heddi Sinaga  
(Orang tua murid)

## DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara Bersama Bapak Holong Siagian  
(Orang tua murid)



SD Negeri 178493 Batu Mamak



**KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TRIWULAN**  
TAHUN ANGGARAN : 2023

**A. PENERIMAAN**

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01	BOS Reguler	201.600.000
<b>Total Penerimaan</b>		<b>201.600.000</b>

**B. BELANJA**

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	Triwulian			
				Volume	Tarif Harga		1	2	3	4
1.		03.	Pengembangan Standar Proses			24.858.319	8.216.129	3.500.000	4.499.980	8.642.210
2.		03.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler			6.700.000	0	3.500.000	2.300.000	900.000
3.		03.03.16.	Pengembangan pendidikan karakter/pemumbuhan budi pekerti, dan kegiatan program pelayanan keluarga di sekolah			800.000	0	0	800.000	0
4.	5.1.02.02.01	03.03.16.	Honorarium Narasumber Pejabat Eselon I/asetara kegiatan tingkat desa (B7. 2.00. B8. 2.00)	4 Orang / Jam	200.000	800.000	0	0	800.000	0
5.	0003	03.03.33.	Konsultasi peningkatan mutu pendidikan (konsultasi & Psikolog)	29 Orang / Kegiatan	125.000	3.500.000	0	3.500.000	0	0
6.	5.1.02.02.01	03.03.33.	Tas Potensi Akademik, Minat dan Bakat (B4. 28.00)			2.400.000	0	0	1.500.000	900.000
7.	0011	03.03.74.	Pelaksanaan Lomba Lomba			600.000	0	0	600.000	0
8.	5.1.02.04.01	03.03.74.	Penganti transportasi Dalam kecamatan	8 Orang / Kali	75.000					

Kertas Kerja Per Triwulan - NPSN: 10214742 Nama Sekolah: SD NEGERI 178493 BATU MAMAK

Halaman 1 dari 9

**Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SD Negeri 178493 Batu Mamak**